



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A	SISTEM PUSAT PELAYANAN								
1	Pusat Pelayanan Kota								
1.1	Pengembangan WP KIPP								
	a. Pembangunan pusat pemerintahan nasional	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan pusat pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan pusat perkantoran	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.2	WP IKN Barat								
	a. Pembangunan pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pusat pariwisata alam	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala internasional	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan pusat pelayanan pendidikan tinggi	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan simpul transportasi regional	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.3	WP IKN Timur 1								
	a. Pembangunan pusat hiburan skala internasional	sebagian Desa Tangin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pusat pariwisata	sebagian Desa Tangin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2	Sub Pusat Pelayanan Kota								
2.1	Pengembangan WP KIPP								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.2	WP IKN Barat								
	a. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi							
	d. Pembangunan kawasan permukiman perdesaan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.3	WP IKN Timur 1								
	a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan pelayanan Kesehatan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa	APBN, dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	sumber lain yang sah						
	d. Pembangunan kawasan pelayanan pendidikan tinggi	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN	Otorita IKN					
	f. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	g. Pembangunan kawasan permukiman perdesaan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.4	WP IKN Timur 2								
	a. Pembangunan pusat pendidikan tinggi skala internasional	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pusat riset dan inovasi	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	e. Pembangunan kawasan pelayanan kesehatan	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.5	WP IKN Utara								
	a. Pembangunan pusat riset dan inovasi	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan pelayanan pendidikan tinggi	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pembangunan kawasan pariwisata	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan kawasan pelayanan kesehatan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN	Otorita IKN					
	h. Pembangunan kawasan pertanian perkotaan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3	Pusat Pelayanan Lingkungan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
3.1	WP KIPP								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.2	WP IKN Barat								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.3	WP IKN Timur 1								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Tengin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Tengin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.4	WP IKN Timur 2								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.5	WP IKN Utara								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.6	WP Simpang Samboja								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Sungai Merdeka	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Sungai Merdeka	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.7	WP Kuala Samboja								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Wonotirto	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Wonotirto	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3.8	WP Muara Jawa								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
4	Pusat Petumbuhan Kelautan								
4.1	Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan								
	a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya dengan konsep <i>eco fishing port</i>	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Penyusunan FS dan <i>masterplan</i> pengembangan Pelabuhan perikanan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Penyediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan perikanan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			pendanaan lain yang sah						
	d. Pengembangan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju pelabuhan perikanan, dan sentra perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pengembangan jaringan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan dan sentra perikanan tangkap/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya melalui pendekatan kampung nelayan/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	h. Pengembangan Industri Pengolahan perikanan yang terpadu dengan sentra perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Penyusunan <i>masterplan</i> DED penataan kampung nelayan/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	j. Pengembangan teknologi untuk sistem budidaya ramah lingkungan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	k. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan sentra perikanan tangkap/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	l. Pengembangan pengelolaan sampah/limbah di sentra	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	perikanan tangkap dan sentra perikanan budidaya		pendanaan lain yang sah						
B	SISTEM JARINGAN PRASARANA								
1	Sistem Jaringan Transportasi								
1.1	Sistem Jaringan Jalan								
1.1.1	Jalan Umum								
1.1.1.1	Jaringan Jalan Arteri Primer								
	Pembangunan Jalan Arteri Primer ruas jalan AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, dan AP-5	Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Tengin Baru, Kelurahan Sungai Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, kawasan	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Arteri Primer ruas jalan Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) dan ruas jalan KM 38 - Semoi Sepaku	Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Karya Merdeka	APBN	Otorita IKN					
	Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Arteri Primer ruas Semoi Sepaku - Petung (Penajam), Sp. Samboja Km 38 Bpn (Gereja) - Loa Janan	Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Batuah, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan (WP IKN Selatan, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN	Otorita IKN					
1.1.1.2	Jaringan Jalan Arteri Sekunder								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas jalan AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, dan AS-32	Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 2)	APBN	Otorita IKN					
	Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas jalan AS-5, AS-6, AS-7, AS-8, AS-9, AS-10, AS-11, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-16, AS-17, AS-18, AS-19, AS-20, AS-21, AS-22, AS-23, AS-24, AS-26, AS-27, AS-28, AS-29, AS-30, AS-31, dan AS-33	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sungai Payang, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	Pembangunan Multi-utility Tunnel ruas Jalan AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5, AS-6, AS-7, AS-8, AS-9, AS-10, AS-11, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-16, AS-17, AS-18, AS-19, AS-20, AS-21, AS-22, AS-23, AS-24, AS-26, AS-27, AS-28, AS-29, AS-30, AS-31, AS-32, dan AS-33	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sungai Payang, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Timur 1, WP IKN Timur 2							
1.1.1.3	Jaringan Jalan Kolektor Primer								
	a. Pembangunan Jalan Kolektor Primer ruas jalan KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7, dan KP-8;	Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang (WP Muara Jawa)	APBN	Otorita IKN					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Kolektor Primer ruas jalan Bts.	Kelurahan Amborawang Darat, Desa Beringin	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	Balikpapan - Sp. Samboja, Jalan Km 48, Km. 38 - Sp. Samboja, Sanga Sanga - Dondang (Bentuas), Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa dan KP-9	Agung, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Dondang, Desa Handil Baru, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Salok Api Barat, Desa Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Wonotirto, Desa							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sungai Payang (WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
1.1.1.4	Jaringan Jalan Kolektor Sekunder								
	a. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan KS-10, KS-30, KS-31, KS-40, KS-41, KS-42, KS-43, KS-44, KS-45, KS-46, KS-47, KS-48, KS-49, KS-50, KS-51, KS-52, KS-53, KS-54, KS-55, KS-56, KS-57, KS-58, KS-59, KS-60, KS-61, KS-62, KS-63, KS-64, KS-65, KS-66, KS-67, KS-68, KS-69, KS-70, KS-71, KS-72, KS-283	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-11, KS-12, KS-13,	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-21, KS-22, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-73, KS-74, KS-75, KS-77, KS-78, KS-79, KS-80, KS-81, KS-82, KS-83, KS-85, KS-86, KS-87, KS-88, KS-89, KS-90, KS-91, KS-92, KS-93, KS-94, KS-95, KS-96, KS-97, KS-98, KS-99, KS-100, KS-101, KS-102, KS-103, KS-104, KS-105, KS-106, KS-107, KS-108, KS-109, KS-110, KS-111, KS-112, KS-113, KS-114, KS-115, KS-116, KS-117, KS-118, KS-119, KS-120, KS-121, KS-122, KS-123, KS-124, KS-125, KS-126, KS-127, KS-128, KS-129, KS-130, KS-131, KS-132, KS-133, KS-134, KS-135, KS-136, KS-137, KS-138, KS-139, KS-140, KS-141, KS-142, KS-143, KS-144, KS-145, KS-146, KS-147, KS-148, KS-149,	Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Jonggon Desa, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo,							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-150, KS-151, KS-152, KS-153, KS-154, KS-155, KS-156, KS-157, KS-158, KS-159, KS-160, KS-161, KS-162, KS-163, KS-164, KS-165, KS-166, KS-167, KS-168, KS-170, KS-171, KS-172, KS-173, KS-174, KS-175, KS-176, KS-177, KS-178, KS-179, KS-180, KS-181, KS-182, KS-183, KS-184, KS-185, KS-186, KS-187, KS-188, KS-189, KS-190, KS-191, KS-192, KS-193, KS-194, KS-195, KS-196, KS-197, KS-198, KS-199, KS-200, KS-201, KS-202, KS-203, KS-204, KS-205, KS-206, KS-207, KS-208, KS-209, KS-210, KS-211, KS-212, KS-213, KS-214, KS-215, KS-216, KS-217, KS-218, KS-219, KS-220, KS-221, KS-222, KS-223, KS-224, KS-225, KS-226, KS-227, KS-228, KS-229, KS-230, KS-231, KS-232, KS-233, KS-234, KS-235, KS-236, KS-237, KS-238, KS-239, KS-240, KS-241, KS-242,	Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru, Kelurahan Wonotirto (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-243, KS-244, KS-245, KS-246, KS-247, KS-248, KS-249, KS-250, KS-252, KS-253, KS-254, KS-255, KS-256, KS-257, KS-258, KS-259, KS-260, KS-261, KS-262, KS-263, KS-264, KS-265, KS-266, KS-267, KS-268, KS-269, KS-270, KS-271, KS-272, KS-273, KS-274, KS-275, KS-276, KS-277, KS-278, KS-279, KS-280, KS-281 dan KS-282								
	c. Pembangunan Multi-utility Tunnel ruas Jalan pada ruas KS-10, KS-30, KS-31, KS-40, KS-41, KS-42, KS-43, KS-44, KS-45, KS-46, KS-47, KS-48, KS-49, KS-50, KS-51, KS-52, KS-53, KS-54, KS-55, KS-56, KS-57, KS-58, KS-59, KS-60, KS-61, KS-62, KS-63, KS-64, KS-65, KS-66, KS-67, KS-68, KS-69, KS-70, KS-71, KS-72, KS-283, KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-11, KS-12, KS-13, KS-15, KS-16, KS-	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Jonggon Desa, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-21, KS-22, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-73, KS-74, KS-75, KS-77, KS-78, KS-79, KS-80, KS-81, KS-82, KS-83, KS-85, KS-86, KS-87, KS-88, KS-89, KS-90, KS-91, KS-92, KS-93, KS-94, KS-95, KS-96, KS-97, KS-98, KS-99, KS-100, KS-101, KS-102, KS-103, KS-104, KS-105, KS-106, KS-107, KS-108, KS-109, KS-110, KS-111, KS-112, KS-113, KS-114, KS-115, KS-116, KS-117, KS-118, KS-119, KS-120, KS-121, KS-122, KS-123, KS-124, KS-125, KS-126, KS-127, KS-128, KS-129, KS-130, KS-131, KS-132, KS-133, KS-134, KS-135, KS-136, KS-137, KS-138, KS-139, KS-140, KS-141, KS-142, KS-143, KS-144, KS-145, KS-146, KS-147, KS-148, KS-149, KS-150,	Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru,							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	KS-151, KS-152, KS-153, KS-154, KS-155, KS-156, KS-157, KS-158, KS-159, KS-160, KS-161, KS-162, KS-163, KS-164, KS-165, KS-166, KS-167, KS-168, KS-170, KS-171, KS-172, KS-173, KS-174, KS-175, KS-176, KS-177, KS-178, KS-179, KS-180, KS-181, KS-182, KS-183, KS-184, KS-185, KS-186, KS-187, KS-188, KS-189, KS-190, KS-191, KS-192, KS-193, KS-194, KS-195, KS-196, KS-197, KS-198, KS-199, KS-200, KS-201, KS-202, KS-203, KS-204, KS-205, KS-206, KS-207, KS-208, KS-209, KS-210, KS-211, KS-212, KS-213, KS-214, KS-215, KS-216, KS-217, KS-218, KS-219, KS-220, KS-221, KS-222, KS-223, KS-224, KS-225, KS-226, KS-227, KS-228, KS-229, KS-230, KS-231, KS-232, KS-233, KS-234, KS-235, KS-236, KS-237, KS-238, KS-239, KS-240, KS-241, KS-242, KS-243,	Kelurahan Wonotirto (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-244, KS-245, KS-246, KS-247, KS-248, KS-249, KS-250, KS-252, KS-253, KS-254, KS-255, KS-256, KS-257, KS-258, KS-259, KS-260, KS-261, KS-262, KS-263, KS-264, KS-265, KS-266, KS-267, KS-268, KS-269, KS-270, KS-271, KS-272, KS-273, KS-274, KS-275, KS-276, KS-277, KS-278, KS-279, KS-280, KS-281 dan KS-282								
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan Jalan Handil Gantung, Jalan Handil Idum, Jalan Inpres Jalur Pipa, Jalan Merdeka, Jalan Pesisir Silambanan, Jalan Sukarelawan Handil IX, Jalan T. Ladang, Jalan Tahir, Jalan Toha, Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa, KS-14, KS-23, KS-76, KS-84, KS-169, KS-251	Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kampung Lama, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Tanjung Harapan (WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa)							
1.1.1.5	Jaringan Jalan Lokal Primer								
	a. Pembangunan Jalan Lokal Primer ruas jalan LP-1	Desa Argomulyo, Kelurahan Sukomulyo (WP IKN Timur 1)	APBN	Otorita IKN					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Primer ruas Jalan Km. 38 – Semoi Sepaku	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Sukomulyo, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tengin Baru (WP IKN Barat, WP IKN	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Timur 1, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Primer LP-2	Desa Batuah, Kelurahan Dondang, Desa Tani Harapan, dan Kelurahan Teluk Dalam di Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN	Otorita IKN					
1.1.1.6	Jaringan Jalan Lokal Sekunder								
	a. Pembangunan Jalan Lokal Sekunder ruas LS-41, LS-42, LS-43, LS-44, LS-45, LS-46, LS-48, LS-49, LS-53, LS-54, LS-55, LS-56, LS-57, LS-58, LS-59, LS-62, LS-63, LS-64, LS-65, LS-66, LS-68, LS-69, LS-70, LS-71, LS-72, LS-73, LS-74, LS-75, LS-76, LS-77, LS-79, LS-80, LS-81, LS-82,	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-83, LS-84, LS-85, LS-86, LS-87, LS-88, LS-89, LS-90, LS-91, LS-93, LS-94, LS-95, LS-96, LS-97, LS-98, LS-99,LS-100, LS-101, LS-102, LS-103, LS-104, LS-105, LS-106, LS-107, LS-108, LS-109, LS-110, LS-111, LS-112, LS-113, LS-114, LS-115, LS-116, LS-117, LS-118, LS-119, LS-120, LS-121, LS-122, LS-123, LS-124, LS-125, LS-126, LS-127, LS-128, LS-129, LS-130, LS-131, LS-132, LS-133, LS-134, LS-135, LS-136, LS-137, LS-138, LS-139, LS-140, LS-141, LS-142, LS-143, LS-144, LS-145, LS-146, LS-147, LS-148, LS-149, LS-150, LS-151, LS-152, LS-153, LS-154, LS-155, LS-156, LS-157, LS-158, LS-159, LS-160, LS-161, LS-162, LS-163, LS-164, LS-165, LS-166, LS-167, LS-168, LS-169, LS-170, LS-171, LS-172, LS-173, LS-174, LS-175, LS-176, LS-177,								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-178, LS-179, LS-180, LS-181, LS-182, LS-183, LS-184, LS-185, LS-186, LS-187, LS-188, LS-189, LS-190, LS-191, LS-192, LS-193, LS-194, LS-195, LS-196, LS-197, LS-198, LS-199, LS-200, LS-201, LS-202, LS-203, LS-204, LS-205, LS-206, LS-207, LS-208, LS-209, LS-210, LS-221, LS-222, LS-223, LS-224, LS-225, LS-226, LS-227, LS-228, LS-229, LS-230, LS-231, LS-232, LS-233, LS-234, LS-235, LS-236, LS-237, LS-238, LS-240, LS-241, LS-242, LS-243, LS-244, LS-245, LS-246, LS-247, LS-248, LS-249, LS-251, LS-252, LS-253, LS-254, LS-255, LS-256, LS-257, LS-258, LS-259, LS-260, LS-261, LS-262, LS-263, LS-264, LS-265, LS-266, LS-267, LS-268, LS-269, LS-270, LS-271, LS-272, LS-273, LS-274, LS-275, LS-276, LS-277, LS-278, LS-279, LS-280, LS-281,								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-282, LS-283, LS-284, LS-285, LS-286, LS-287, LS-288, LS-289, LS-290, LS-291, LS-292, LS-293, LS-294, LS-295, LS-296, LS-297, LS-298, LS-299, LS-300, LS-301, LS-302, LS-303, LS-304, LS-305, LS-306, LS-307, LS-308, LS-309, LS-310, LS-311, LS-312, LS-313, LS-314, LS-315, LS-316, LS-317, LS-318, LS-319, LS-320, LS-322, LS-323, LS-324, LS-325, LS-326, LS-327, LS-328, LS-329, LS-330, LS-331, LS-332, LS-333, LS-334, LS-335, LS-336, LS-337, LS-338, LS-339, LS-340, LS-341, LS-342, LS-343, LS-344, LS-345, LS-346, LS-347, LS-348, LS-349, LS-350, LS-351, LS-352, LS-353, LS-354, LS-357, LS-363, LS-365, LS-366, LS-367, LS-368, LS-371, LS-372, LS-373, LS-374, LS-375, LS-376, LS-377, LS-378, LS-379, LS-382, LS-384, LS-385, LS-386, LS-388,								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	LS-389, LS-390, LS-392, LS-393, LS-397, LS-398, LS-400, LS-405, LS-408, LS-409, LS-410, LS-411, LS-412, LS-413, LS-417, LS-418, LS-419, LS-420, LS-421, LS-422, LS-423, LS-425, LS-430, LS-431, LS-434, LS-435, LS-436, LS-437, LS-438, LS-442, LS-443, LS-445, LS-446, LS-447, LS-448, LS-449, LS-450, LS-454, LS-455, LS-458, LS-459, LS-460, LS-461, LS-462, LS-463, LS-464, LS-465, LS-466, LS-467, LS-468, LS-469, LS-472, LS-473, LS-474								
	b. Pembangunan Jalan Lokal Sekunder ruas LS-3, LS-4, LS-6, LS-10, LS-12, LS-13, LS-14, LS-15, LS-20, LS-21, LS-22, LS-23, LS-24, LS-27, LS-28, LS-30, LS-31, LS-32, LS-33, LS-34, LS-35, LS-36, LS-37, LS-38, LS-39, LS-40, LS-47, LS-50, LS-51, LS-61, LS-78, LS-92, LS-358, LS-359,	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Handil Baru, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan Muara Jawa	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-360, LS-361, LS-362, LS-364, LS-386, LS-369, LS-370, LS-380, LS-381, LS-383, LS-387, LS-391, LS-394, LS-395, LS-396, LS-399, LS-401, LS-402, LS-403, LS-404, LS-406, LS-407, LS-414, LS-415, LS-424, LS-426, LS-427, LS-428, LS-429, LS-432, LS-433, LS-439, LS-440, LS-441, LS-444, LS-451, LS-452, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, LS-475, LS-476, LS-477, LS-478, LS-479, LS-480, LS-481, LS-482, LS-483, LS-484, LS-485, LS-486, LS-487, LS-488, LS-489, LS-490, LS-491, LS-492, LS-493, LS-494, LS-495, LS-496, LS-497, LS-498, LS-499, LS-500, LS-501, LS-502, LS-503, LS-504, LS-505, LS-506, LS-507, LS-508, LS-509, LS-510, LS-511, LS-512, LS-513, LS-514, LS-515, LS-516, LS-517, LS-518, LS-519, LS-520, LS-521, LS-522, LS-523, LS-524, LS-525,	Tengah, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo, Desa Sungai Payang, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru, Kelurahan Wonotirto (WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Kuala Samboja, WP							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-526, LS-527, LS-528, LS-529, LS-530, LS-531, LS-532, LS-533, LS-534, LS-535, LS-536, LS-537, LS-538, LS-539, LS-540, LS-541, LS-542, LS-543, LS-544, LS-545, LS-546, LS-547, LS-548, LS-549, LS-550, LS-551, LS-552, LS-553, LS-554, LS-555, LS-556, LS-557, LS-558, LS-559, LS-560, LS-561, LS-562, LS-563, LS-564, LS-565, LS-566, LS-567, LS-568, LS-569, LS-570, LS-571, LS-572, LS-573, LS-574, LS-575, LS-576, LS-577, LS-578, LS-579, LS-580, LS-581, LS-582, LS-583, LS-584, LS-585, LS-586, LS-587, LS-588, LS-590, LS-591, LS-592, LS-593, LS-594, LS-595, LS-596, LS-597, LS-598, LS-599, LS-600, LS-601, LS-602, LS-603, LS-604, LS-605, LS-606, LS-607, LS-608, LS-609, LS-610, LS-611, LS-612, LS-613, LS-614, LS-615, LS-616, LS-617, LS-618,	Simpang Samboja, WP Muara Jawa)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	LS-619, LS-620, LS-621, LS-622, LS-623, LS-624, LS-625, LS-626, LS-627, LS-628, LS-629, LS-630, LS-631, LS-632, LS-633, LS-634, LS-635, LS-636, LS-637, LS-638, LS-639, LS-640, LS-641, LS-642, LS-643, LS-644, LS-64s5, LS-646, LS-647, LS-648, LS-649, LS-650, LS-651, LS-652, LS-653, LS-654, LS-655, LS-656, LS-657, LS-658, LS-659, LS-660, LS-661, LS-662, LS-663, LS-664, LS-665, LS-666, LS-667, LS-668, LS-669, LS-670, LS-671, LS-672, LS-673, LS-674, LS-675, LS-676, LS-677, LS-678, LS-679, LS-680, LS-681, LS-682, LS-683, LS-684, LS-685, LS-686, LS-687, LS-688, LS-689, LS-690, LS-691, LS-692, LS-693, LS-694, LS-695, LS-696, LS-697, LS-698, LS-699, LS-700, LS-701, LS-702, LS-703, LS-704, LS-705, LS-706, LS-707, LS-708, LS-709, LS-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	710, LS-711, LS-712, LS-713, LS-714, LS-715, LS-716, LS-717, LS-718, LS-719, LS-720, LS-721, LS-722, LS-723, LS-724, LS-725, LS-726, LS-727, LS-728, LS-729, LS-730, LS-731, LS-732, LS-733, LS-734, LS-735, LS-736, LS-737, LS-738, LS-739, LS-740, LS-741, LS-742, LS-743, LS-744, LS-745, LS-746, LS-747, LS-748, LS-749, LS-750, LS-751, LS-752, LS-753, LS-754, LS-755, LS-756, LS-757, LS-758, LS-759, LS-760, LS-761, LS-762, LS-763, LS-764, LS-765, LS-766, LS-767, LS-768, LS-769, LS-770, LS-771, LS-772, LS-773, LS-774, LS-775, LS-776, LS-777, LS-778, LS-779, LS-780, LS-781, LS-782, LS-783, LS-784, LS-785, LS-786, LS-787, LS-788, LS-789, LS-790, LS-791, LS-792, LS-793, LS-794, LS-795, LS-796, LS-797, LS-798, LS-799, LS-800, LS-801, LS-								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	802, LS-803, LS-804, LS-805, LS-806, LS-807, LS-808, LS-809, LS-810, LS-811, LS-812, LS-813, LS-814, LS-815, LS-816, LS-817, LS-818, LS-819, LS-820, LS-821, LS-822, LS-823, LS-824, LS-825, LS-826, LS-827.								
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Sekunder ruas Jalan Delima, Jalan Durul Ilmi, Jalan Handil Idum, Jalan Jalur, Jalan Jalur Pipa, Jalan Karya Bakti, Jalan Karya Bangun, Jalan Karya Jaya, Jalan KS Tubun, Jalan, Martadinata, Jalan Mulawarman, Jalan Semangka, Jalan Sungai Raden Muara, LS-1, LS-2, LS-5, LS-7, LS-8, LS-9, LS-11, LS-16, LS-17, LS-18, LS-19, LS-25, LS-26, LS-29, LS-52, LS-60, LS-416, LS-471, LS-589.	Desa Argomulyo, Desa Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang,	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kelurahan Sanipah, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Wonotirto (WP IKN Timur 1, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
1.1.2	Jaringan Jalan Khusus								
	a. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-1 yang menghubungkan KIPP dengan WP IKN Selatan	Desa Bumi Harapan (WP KIPP, WP IKN Selatan)	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-2 yang menghubungkan istana negara dengan markas besar Tentara Nasional Indonesia di WP KIPP	Kelurahan Pemaluan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-3 yang menghubungkan WP KIPP dengan pelabuhan khusus	Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					
1.1.3	Jalan Tol								
	a. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM 11 - <i>junction</i> Pulau Balang	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan Jalan Tol <i>junction</i> Pulau Balang - KIPP IKN	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Mentawir, Kelurahan Pemaluan (Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Jalan Tol Bandara Sepinggang – Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pembangunan Jalan Tol Bandara VVIP - <i>outer ringroad</i> KIPP	Kelurahan Binuang, Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan (Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.1.4	Terminal Penumpang								
	a. Pembangunan pelayanan sistem angkutan umum penumpang berupa terminal tipe A	Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pelayanan sistem angkutan umum penumpang berupa terminal tipe B	Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
		Kecamatan Samboja di WP Simpang Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.1.5	Terminal Barang								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pembangunan pelayanan sistem angkutan barang regional berupa terminal barang dengan konsep pengembangan <i>cargo oriented development</i>	Kecamatan Samboja di WP Simpang Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.1.6	Jembatan Timbang								
	Pembangunan alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang dan/atau angkutan berupa jembatan timbang	WP Simpang Samboja	APBN	Otorita IKN					
1.1.7	Jembatan								
	Pembangunan jembatan	tersebar di Seluruh Wilayah Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara	APBN	Otorita IKN					
1.2	Sistem Jaringan Kereta api								
1.2.1	Jaringan Jalur Kereta Api								
1.2.1.1	Jaringan Jalur Kereta Api Umum								
	Jaringan jalur kereta api antarkota								
	a. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango -	Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Bukit Merdeka,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda	Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tani Bhakti, Kelurahan Jawa, Kelurahan Maridan (WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	b. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - Sp. Samboja - Karang Joang - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.	Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Desa Wono Sari, Desa Margomulyo, Desa Karya Merdeka, Desa Tani Bakti, Desa Salok Api Barat (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan) dan Kota Balikpapan							
	Jaringan jalur kereta api perkotaan								
	a. Pembangunan jaringan kereta api perkotaan yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara	Desa Sungai Payang, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	b. Pembangunan jaringan kereta api perkotaan yang menghubungkan WP IKN Barat - WP IKN Timur 2	Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku (WP IKN Barat, WP IKN Timur 2)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.2.2	Stasiun Kereta Api								
1.2.2.1	Stasiun Kereta Api Penumpang								
	a. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Sentral Bumi Harapan	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	b. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Sentral Sepaku	Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Simpang Tengin Baru	Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Bumi Harapan	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Pemaluan	Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Bumi Harapan 2	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 1	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
			sumber lain yang sah						
	h. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sepaku	Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 2	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	j. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sukaraja 1	Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	k. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Tengin Baru	Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	l. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 3	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	m. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sukaraja 2	Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	n. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sungai Payang	Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu WP IKN Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.2.2.2	Stasiun Operasi								
	Pembangunan stasiun operasi kereta api berupa stasiun depo KIPP, stasiun depo IKN Barat, stasiun depo IKN Timur 1, stasiun depo IKN Timur 2	Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
1.3.1	Pelabuhan Sungai dan Danau								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan angkutan sungai dan danau Pelabuhan Mentawir	Kecamatan Sepaku	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.3.2	Pelabuhan Penyeberangan								
	Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan kegiatan angkutan penyeberangan Pelabuhan Handil II	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.3.3	Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau								
	a. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Penyeberangan Penajam	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Jenebora	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Pantai Lango	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke e. <i>International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kenangan</i>	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.3.4	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi								
	Peningkatan dan/atau pemantapan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Handil II menuju Pelabuhan Ferry Sanga-Sanga	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
1.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut								
1.4.1	Pelabuhan Laut								
	1. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Pelabuhan Pengumpul Kuala Samboja	Desa Samboja Kuala di WP Kuala Samboja)	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pengembangan dan peningkatan peran Pelabuhan Pengumpul Kuala Samboja	Desa samboja Kuala di WP Kuala Samboja	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.4.2	Pelabuhan Lainnya								
	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	Desa samboja Kuala di WP Kuala Samboja	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.4.3	Alur Pelayaran								
	1. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran masuk ke pelabuhan Samarinda	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	masuk ke pelabuhan Kuala Samboja		pendanaan lain yang sah						
	3. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran masuk ke pelabuhan Handil II	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
1.5	Sistem Angkutan Umum Massal								
	1. Pembangunan koridor angkutan umum masal regional	Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tani Bhakti, Kelurahan Jawa, Kelurahan Maridan, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan,	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Wono Sari (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2 (WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	2. Pembangunan koridor angkutan umum masal primer	Desa Sungai Payang, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		(WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	3. Pembangunan koridor angkutan umum masal sekunder (BRT) Koridor 1 <i>loop line</i> PPK KIPP, Koridor 2 <i>loop line</i> Sumbu Kebangsaan, Koridor 3 yang menghubungkan PPL KIPP 1 – PPL KIPP 2	Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pembangunan koridor angkutan umum masal sekunder (BRT) koridor 4 <i>loop line</i> KIPP 1B, Koridor 5 <i>loop line</i> KIPP 1C, Koridor 6 yang menghubungkan PPK IKN Timur 4A – SPPK IKN Timur 5A via PPK IKN Barat 2C, Koridor 7 yang menghubungkan IKN Timur 4A – SPPK IKN Timur 5A, Koridor 8 yang menghubungkan IKN Timur 4B – PPK IKN Barat 2B, Koridor 9 yang	Kecamatan Sepaku, di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	menghubungkan KIPP 1A – SPPK IKN Barat 2A, Koridor 10 yang menghubungkan PPL IKN BARAT 2A – SPPK IKN Barat 2A, Koridor 11 yang menghubungkan <i>loop line</i> KIPP 1B – <i>loop line</i> Sumbu Kebangsaan, Koridor 12 yang merupakan <i>loop line</i> SPPK KIPP 1B dan Koridor 13 yang merupakan <i>loop line</i> SPPK KIPP 1C								
2	Sistem Jaringan Energi								
2.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi								
	Studi perencanaan dan studi kelayakan pengembangan jaringan gas kota (Jargas)	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
2.2.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung								
	a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya	Kelurahan Pemaluan, Desa Argomulto, Desa	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sukomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Desa Batuah, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Sungai Merdeka (WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Utara, WP IKN Simpang Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	sumber lain yang sah						
	b. Pembangunan pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga hidrogen	Kelurahan Pemaluan, Desa Argomulyo, Kelurahan Bukit Merdeka, Desa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Samboja Kuala (WP IKN Selatan, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
2.2.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung								
2.2.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem								
	a. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	Desa Semoi Dua, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Pemaluanm Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Tengin Baru, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Beringin Agungm Kelurahan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Bukit Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	Desa Batuah, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Kampung Lama, Desa samboja Kuala, Kelurahan Teluk Pemedas,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		Kelurahan Ambarawang Darat, Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Salok Api Barat, Desa Batuah, Kelurahan Dondang, Kelurahan Margomulyo (WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	c. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 – WP IKN Timur 2 – WP IKN Utara di KIKN, serta WP Simpang Samboja – WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 – WP IKN Timur 2 – WP IKN Utara di KIKN, serta WP Simpang Samboja – WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.2.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik								
	a. Pembangunan Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM (saluran udara tegangan menengah)	Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan saluran kabel tegangan menengah	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2.2.2.3	Gardu Listrik								
	a. Pembangunan Gardu listrik	Desa Bukit Raya, Desa Argomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Kelurahan Pemaluan, Desa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		Semoi Dua, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Desa Samboja Kuala, Desa teluk Dalam (WP KIPP, IKN Barat, WP IKN Timur 1 WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Gardu Listrik	Desa Bukit Raya, Desa Argomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai ayang, Kelurahan Pemaluan, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Desa Samboja Kuala, Desa teluk Dalam (WP KIPP, IKN Barat, WP IKN Timur 1 WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	a. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan jaringan tetap	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan jaringan bergerak meliputi:								
	1. Jaringan bergerak teresterial	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan bergerak selular	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Jaringan bergerak satelit	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Pembangunan infrastruktur pasif untuk jaringan tetap dan jaringan bergerak	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, dan di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	sumber lain yang sah APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
4.1	Sistem Jaringan Irigasi								
	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi sekunder 1. Pemantapan areal irigasi teknis 2. Peningkatan pengairan dari irigasi non teknis menjadi irigasi teknis	Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
4.2	Sistem Pengendalian Banjir								
	a. Pembangunan drainase primer dan kolam retensi	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Pelaksanaan kajian pembangunan drainase primer dan kolam retensi	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan kapasitas sungai dan penataan riparian	DAS Sanggai, DAS Samboja, DAS Dondang	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan, peningkatan dan pemantapan Sistem informasi Hidroklimatika (<i>Flood Forecasting and Early warning System</i>) sebagai perwujudan <i>Smart Water Management</i> .	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
4.3	Bangunan Sumber Daya Air								
	a. Peningkatan dan/atau pemantapan Bendungan Samboja	Desa Bukit Raya, Desa Karya Jaya di Kawasan Penyangga Lingkungan dan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Ketahanan Pangan pada KPIKN							
	b. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi	Desa Suko Mulyo di WP IKN Timur I	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan Bendungan Batu Lepek	Kecamatan Loa Kulu yang berada di luar KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat N					
	d. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan	Kelurahan Pemaluan di WP IKN Selatan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pelaksanaan kajian lanjutan kelayakan dan detail desain bangunan sumber daya air IKN Barat dan bangunan sumber daya air IKN Selatan	Kelurahan Pemaluan di WP IKN Selatan dan Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
5	Infrastruktur Perkotaan								
5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
5.1.1	Unit Air Baku								
	1. Pembangunan <i>intake</i> Sungai Sepaku	Desa Bumi Harapan di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pembangunan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi	Desa Tengin Baru di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Pembangunan <i>intake</i> Bendungan Batu Lepek	Kecamatan Loa Kulu di luar KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pembangunan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	5. Pembangunan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan	Kelurahan Peraluan di WP IKN Selatan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
5.1.2	Unit Produksi								
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)								
	1. IPA Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. IPA Sepaku Semoi	Desa Tengin Baru di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.1.3	Jaringan Air Baku								
	Pembangunan jaringan air baku								
	1. Jaringan <i>intake</i> Batu Lepek – Terminal Air (<i>Reservoir</i>)	WP KIPP, WP IKN Timur 1 di KIKN, serta Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat – Terminal Air (<i>Reservoir</i>)	WP IKN Barat di KIKN, WP KIPP	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			sumber lain yang sah						
	3. Jaringan <i>intake</i> bangunan sumber daya air IKN Selatan – Terminal Air (<i>Reservoir</i>)	WP KIPP di KIKN, serta Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pelaksanaan Studi Kelayakan <i>Intake</i> Sungai Mahakam	Provinsi Kalimantan Timur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.1.4	Jaringan Distribusi								
	Pembangunan jaringan distribusi								
	1. Jaringan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat – WP KIPP	WP KIPP dan WP IKN Barat di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan <i>intake</i> Batu Lepek – Terminal Air (<i>Reservoir</i>)	Kecamatan Loa Kulu di luar KSN Ibu Kota Nusantara, WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	3. Jaringan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi – WP IKN Barat	WP IKN Barat, WP IKN Timur 2 di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Jaringan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi – WP IKN Selatan	WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	5. Terminal Air (<i>Reservoir</i>) – WP KIPP	WP KIPP di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	a. Pembangunan infrastruktur SPAL domestik	Kelurahan Pemaluan dan Desa Argomulyo, di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan jaringan SPAL domestik	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Utara di KIKN, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa di KPIKN							
5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	Pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, Kelurahan Bumi Harapan, Desa Wonosari, Kelurahan Karya Merdeka, Desa Sanipah (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.4	Sistem Jaringan Persampahan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Desa Wonosari di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, Desa Bumi Harapan (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Desa Bukit Raya dan Desa Sanipah (WP IKN Barat serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kelurahan Karya Merdeka di kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		lingkungan dan ketahanan pangan							
5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	a. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan Sungai Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa)							
	b. Pembangunan jalur evakuasi bencana	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara di KIKN, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan Kawasan Penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.6	Sistem Jaringan Drainase								
	a. Pembangunan jaringan drainase primer meliputi:								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	1. Sungai Babatan, Sungai Benongan, Sungai Daup, Sungai Kaman, Sungai Leta putih, Sungai Lop, Sungai Malau, Sungai Mangkununu, Sungai Mentawir, Sungai Menting, Sungai Mentoyo, Sungai Pemaluan, Sungai Penyanggulen, Sungai Sekambing, Sungai Sepaku, Sungai Tebuni, Sungai Tiram Tambun, Sungai Tirou, Sungai Trunen, Sungai Turing Besar Sungai Turing Kecil di DAS Sanggai	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara di KIKN dan Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan di KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Sungai Gelendrong, Sungai Handil Idum, Sungai Panani, Sungai Sanipah, Sungai Tanjung Kubur di DAS Dondang	WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	3. Sei Ambarawang Laut, Sei Salok Api Laut, Sungai Kuala, Sungai Serayu di DAS Samboja	WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan jaringan drainase sekunder	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.7	Sistem Jaringan Pejalan Kaki								
	Penyediaan jalur pejalan kaki	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5.8	Sistem Jaringan Jalur Sepeda								
	Penyediaan fasilitas jalur sepeda	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
II	PERWUJUDAN POLA RUANG								
A	Zona Lindung								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	a. Rehabilitasi dan perlindungan hutan lindung b. Pengendalian pemanfaatan hutan lindung	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan Kawasan Penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					
2	Kawasan Perlindungan Setempat								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan pantai								
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai b. Pengembangan <i>mangrove</i> dan tanaman pantai	WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Perlindungan dan pengendalian ekosistem pantai d. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi pantai e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar pantai	lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN							
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai:								
	a. Normalisasi dan restorasi sungai, serta pencegahan pengembangan kegiatan budidaya disepanjang aliran sungai b. Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan c. Penghijauan pada kawasan sempadan sungai d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar sungai	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		ketahanan pangan pada KPIKN							
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan sekitar danau/waduk								
	a. Pengaman daerah hulu b. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya c. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan waduk secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2 dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					
3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau								
	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH								
	a. Pengembangan RTH rimba kota	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
		Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN							
	b. Pembangunan RTH taman kota	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan RTH taman kecamatan	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan RTH taman kelurahan	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	e. Pembangunan RTH jalur hijau	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP Simpang Samboja, WP Muara Jawa.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Penyediaan dan Pengembangan Pemakaman	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
4	Kawasan Konservasi								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan taman hutan raya:								
	a. Pelestarian kawasan taman hutan raya Bukit Soeharto	kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus di kawasan taman hutan raya c. Pembatasan pembangunan di sekitar kawasan taman hutan raya untuk mencegah timbulnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan taman hutan raya 		sumber lain yang sah						
5	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem <i>mangrove</i>								
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memulihkan, memanfaatkan, dan meningkatkan fungsi ekosistem <i>mangrove</i> b. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan <i>mangrove</i> 	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Mempertahankan dan melestarikan hutan <i>mangrove</i> d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan ekosistem <i>mangrove</i>	lingkungan dan ketahanan pangan							
B	ZONA BUDI DAYA								
1	Kawasan Pertanian								
	Kawasan Tanaman Pangan 1. Pelestarian dan luas areal sawah irigasi teknis 2. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian 3. Penetapan LP2B 4. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik LP2B 5. Rehabilitasi, revitalisasi, dan penataan lahan pertanian	WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
2	Kawasan Perikanan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya b. Peningkatan produktivitas hasil perikanan	WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
3	Kawasan Pertambangan dan Energi								
	a. Pembangunan kawasan pembangkit tenaga listrik b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pembangkit tenaga listrik	WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN	APBN	Otorita IKN					
4	Kawasan Peruntukan Industri								
	Penataan Kawasan peruntukan industri	WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
5	Kawasan Pariwisata								
	a. Pengembangan destinasi pariwisata b. Pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Utara, WP Kuala Samboja.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
6	Kawasan Permukiman								
	a. Kawasan Perumahan								
	1. Pembangunan kawasan perumahan	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung perumahan								
	3. Pengembangan Kawasan permukiman eksisting	WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	4. Pelaksanaan kajian sosial kebijakan/mekanisme relokasi perumahan dan lahan usaha yang berkeadilan (<i>land swap, land transfer, land consolidation</i> dan sebagainya) pada lokasi terdampak pembangunan	IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa.							
	b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial								
	1. Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, dan WP Muara Jawa.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Pengembangan fasilitas pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial								
	c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	1. Pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan 2. Pengembangan fasilitas pendukung kawasan pendukung infrastruktur perkotaan	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
		WP IKN Timur 1, dan Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
7	Kawasan Campuran								
	a. Pembangunan kawasan campuran b. Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan campuran	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
		WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan perdagangan dan jasa	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
9	Kawasan Perkantoran								
	a. Pembangunan kawasan perkantoran	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan perkantoran	WP IKN Timur 2, WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
10	Kawasan Transportasi								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan kawasan transportasi	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Peningkatan jalan akses menuju kawasan transportasi	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	a. Pembangunan markas pertahanan negara b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk instalasi militer c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk instalasi kepolisian	WP KIPP , WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, serta kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pelaksanaan Kajian Lokasi dan Perencanaan Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia e. Pelaksanaan Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Khusus VVIP	lingkungan dan ketanahan pangan							
12	Zona Perairan yang merupakan Zona Pariwisata								
	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi dan daya tarik zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Penyusunan masterplan pengembangan zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Pembangunan sarana prasarana dasar dan penunjang zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pengembangan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	e. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok wisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	f. Pemberian bantuan sarana prasarana pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
13	Zona Perairan yang merupakan Zona Pelabuhan Laut								
	a. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan laut Pelabuhan pengumpul Kuala Samboja	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Mengembangkan jasa kepelabuhanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022- 2024)	Tahap 2 (2025- 2029)	Tahap 3 (2030- 2034)	Tahap 4 (2035- 2039)	Tahap 5 (2040- 2042)
	c. Penataan lalu lintas dan sandar kapal kecil	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Pengendalian pencemaran limbah cair dan padat aktivitas pelabuhan ke laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
14	Zona Perairan yang merupakan Pelabuhan Perikanan								
	a. Penetapan WKOPP	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pendalaman kolam, alur dan area pelabuhan perikanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
15	Zona Perairan yang merupakan Zona Pertambangan Migas								
	a. Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan migas	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
16	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir								
	a. Pengembangan Ekowisata bahari dan atau penelitian dan pengembangan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan Kawasan Ekowisata <i>Mangrove</i>	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Pengawasan, kegiatan pemanfaatan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem dan biota	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	e. Pemberian bantuan sarana prasarana ekowisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	f. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok wisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
17	Zona Perairan yang merupakan Zona Perikanan Tangkap								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan tangkap	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Penataan tambatan perahu nelayan dan petambak	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Pengamanan jalur penangkapan perikanan tradisional	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
18.	Zona Perairan yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan								
	a. Penyusunan masterplan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Penertiban bangunan dan aktivitas di sekitar zona pertahanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	e. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk Daerah Latihan TNI AL	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
19	Zona pemanfaatan lainnya								
	a. Penataan dan pengelolaan pelaksanaan penggelaran pipa bawah laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengawasan, pengamanan dan atau perawatan pipa bawah laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN					
20	Alur Migrasi Biota Laut								
	a. Sosialisasi pengamanan alur migrasi biota laut dilindungi	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Identifikasi alur migrasi biota	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Pengendalian penggunaan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Perlindungan biota laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



[Signature]
Silvanna Djaman

SK No 075001 C